

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kinerja pemerintah daerah di dalam pengelolaan keuangan terus mengalami peningkatan (BPK, 2017). Namun, kinerja pengelolaan keuangan dan organisasi yang baik belum bisa memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kritikan kepada pemerintah daerah baik dalam domestik maupun internasional (Rini & Damiati, 2017). Ahyaruddin dan Akbar (2018) menjelaskan bahwa kinerja pemerintahan yang diberikan hanya sebagai formalitas dan lebih kuat dipengaruhi oleh faktor koersif berupa bentuk tekanan regulasi, sebagaimana yang tertuang dalam teori isomorfisma institusional. Nurkhamid (2008) mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang diungkapkan selama ini cenderung salah dan sepihak, karena mengabaikan program yang gagal dan hanya menyampaikan program yang berhasil. Terkait kinerja pemerintah daerah memiliki relevansi dengan HR Muslim yang berbunyi:

HR. Bukhari dan muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Ra dan Nabi SAW sesungguhnya bersabda “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim diatas dijelaskan bahwa sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban kita dan menjalankan amanah

dengan sebaik-baiknya agar pekerjaan kita membuahkan hasil yang maksimal, salah satunya dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Q.S Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman ndaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah:8)

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 diatas dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita berlaku adil dalam setiap perbuatan dan sesungguhnya kita berbuat adil maka akan lebih dekat dengan ketakwaan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), karena sistem informasi akuntansi di rancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya (Farida, 2015). Susanto (2015) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari sub sistem atau komponen itu sendiri baik fisik maupun non fisik yang saling bekerja sama untuk mengolah data pada transaksi menjadi sistem informasi keuangan. Kuliatas informasi akuntansi didapatkan dari sistem informasi yang efektif dan berkualitas (Fitrios, 2016). Beshi dan Kaur (2020) mengungkapkan bahwa menyediakan sistem informasi akuntansi yang berkualitas dapat menunjukkan daya tangkap, akuntabilitas, dan transparansi, hal tersebut memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa fenomena terkait dengan tercapainya sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Abnur (2018) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa instansi di Pemerintah Indonesia belum mempunyai sistem yang terintegrasikan dan terhubung dengan instansi pemerintah lainnya. Heru (2017) sistem informasi akuntansi yang terdapat pada pemerintah dinilai belum handal. Diperlukannya adanya sistem informasi akuntansi yang handal dalam meningkatkan kinerja. Fenomena-fenomena di atas dikuatkan oleh Budiriyanto (2013) yang menemukan bahwa terhadap isu lain terkait sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia belum memadai. Pada tahun 2018, terdapat 206 pemerintah daerah dengan 304 temuan terkait sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum memadai. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 1 tahun 2017 terjadi kelemahan pada sistem informasi akuntansi dan pelaporannya, termasuk keterlambatan ketidakmampuan staf dalam pelaporan serta masalah pada sistem akuntansi.

Fenomena-fenomena yang disorot di atas diduga menjadi pemicu masih lemahnya kualitas sistem informasi akuntansi di pemerintah daerah. Beberapa penelitian mencatat bahwa sistem informasi akuntansi untuk entitas mana pun tidak ada dengan sendirinya, oleh karena itu harus mempelajari beberapa faktor-faktor yang terkait dengan keberhasilan sistem ini (Mkonya et al., 2018). Teori kontinjensi, menegaskan bahwa desain sistem informasi akuntansi sangat bergantung pada faktor-faktor di dalam organisasi (Fitrios, 2016). Lebih spesifik lagi, bagian sistem informasi akuntansi memuat sumber daya manusia dan sistem teknis (perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi) Bolívar et al., (2006). Karenanya, keselarasan dua aspek tersebut perlu diciptakan agar sistem informasi akuntansi dapat berjalan efektif dan selanjutnya memberikan manfaatnya.

Thoa dan Nhi (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pimpinan, ketersediaan dan fungsi perangkat keras, ketersediaan dan fungsi perangkat lunak, dan ketersediaan fungsi jaringan komunikasi. Namun, pada penelitian Thoa dan Nhi (2022)

terdapat keterbatasan penelitian yakni, data yang sangat beragam, ukuran sampel masih cukup kecil dibandingkan dengan kerangka sampling. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan atau menambah ukuran sampel dan meningkatkan jumlah Lembaga publik yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam pembelanjaan dan investasi.

Borhan dan Nafees (2018) menyelidiki sistem informasi akuntansi pada kinerja keuangan perusahaan real estate terpilih di Yordania. Dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diteliti.

Disisi lain di penelitian Sofyani et al., (2022) berpendapat bahwa teknologi informasi tidak selalu menghasilkan manfaat untuk organisasi. Pendapat ini diperkuat dengan beberapa temuan lain yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja perusahaan dalam kasus tertentu (Chae *et al.*, 2018; Sardjono & Retnowardhani, 2019). Chae *et al.* (2014) menyarankan untuk memeriksa apakah suatu organisasi yang dilengkapi dengan keterampilan memadai dapat memanfaatkan aset teknologi informasi untuk kebutuhan bisnisnya, sebagai faktor yang berkemungkinan mempengaruhi hubungan teknologi informasi dan kinerja.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pemerintah Daerah DIY mendukung dan mempersilahkan masyarakat untuk ikut mengawasi, menilai kinerja pemerintah DIY. Salah satu keberhasilan daerah dapat dilihat dari seberapa besar pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan pemerintahan. Diperolehnya opini tersebut menunjukkan bahwa menggambarkan keberhasilan penerapan Kinerja Pemerintah Daerah Di Yogyakarta. Maka dari itu, studi tentang peran kualitas dalam sistem informasi akuntansi dalam pelaporan Kinerja Pemerintah daerah harus menjadi contoh kabupaten atau kota lain. Dengan menambahkan beberapa determinan yang dapat mempengaruhi kualitas sistem informasi

akuntansi (Sumber : [Http://Bappeda.Jogjaprovo.go.id/Dataku/Data_indikator_kinerja_pemdap](http://Bappeda.Jogjaprovo.go.id/Dataku/Data_indikator_kinerja_pemdap), n.d.)

Secara ringkas dan eksplisit, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa faktor internal yang mencakup pengetahuan kepala akuntan, ketersediaan fungsi perangkat keras, ketersediaan fungsi perangkat lunak, dan ketersediaan fungsi jaringan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hubungan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pada organisasi pemerintah daerah dengan menggunakan beberapa faktor internal yang mencakup pengetahuan kepala akuntan, ketersediaan fungsi perangkat keras, ketersediaan fungsi perangkat lunak, dan ketersediaan fungsi jaringan komunikasi mengenai kualitas sistem informasi akuntansi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan studi empiris tentang sistem informasi akuntansi dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian terkait dampak sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah di Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai Sistem Informasi Akuntansi, Kinerja Pemerintah Daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Ditambah lagi terdapat ketidak konsistenan pada penelitian sebelumnya. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Dan Peran Dari Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Empiris Di Lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta)”**.

B. Masalah

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berperan terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah?
2. Apakah pengetahuan akuntansi berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
3. Apakah ketersediaan dan fungsi hardware berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
4. Apakah ketersediaan dan fungsi software berperan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi?
5. Apakah ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi berperan terhadap kinerja kualitas sistem informasi akuntansi?

2) Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menemukan bukti empiris hubungan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menemukan bukti empiris hubungan pengetahuan akuntansi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
3. Untuk menemukan bukti empiris hubungan ketersediaan dan fungsi hardware terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.
4. Untuk menemukan bukti empiris hubungan ketersediaan dan fungsi software terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

5. Untuk menemukan bukti empiris hubungan ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi terhadap terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

C. Signifikansi

1) Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan peran kualitas sistem informasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan kualitas sistem informasi akuntansi dan determinan atau faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.
- c. Secara literatur penelitian ini mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan kualitas sistem informasi akuntansi, kinerja pemerintah daerah, pengetahuan akuntansi, ketersediaan dan fungsi software, ketersediaan dan fungsi hardware, ketersediaan dan fungsi jaringan komunikasi.